

NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM ISLAM UNTUK MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT

Yuniar Mujiwati

Dosen STKIP PGRI Pasuruan

Abstrak

Dalam kehidupan sekarang ini, kita semua merasakan bahwa pertahanan sosial masyarakat seperti gampang rapuh oleh hal-hal yang remeh, tawuran yang berujung mengorbankan jiwa, tindak pidana pembunuhan dengan latar dan motif yang beragam hingga perilaku koruptif menjalar disemua elemen kehidupan, padahal konon masyarakat kita terkenal dengan patembayan, guyub, harmoni, dan memiliki daya tahan sosial cukup bagus.

Tulisan ini ingin mengungkap bagaimanakah sesungguhnya nilai-nilai demokrasi dalam Islam yang dapat dijelaskan. apakah nilai-nilai demokrasi dalam Islam mampu membangun karakter sebuah masyarakat.

Nilai-nilai demokrasi haruslah melahirkan : partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan, adanya persamaan kedudukan di depan hukum, adanya distribusi pendapatan secara adil, adanya kesempatan pendidikan yang sama, adanya kebebasan berpendapat, berserikat/berkumpul, dan beragama, serta adanya kerjasama setiap prinsip demokrasi.

Kata Kunci : *demokrasi, karakter masyarakat.*

A. Pendahuluan

Masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini berbagai bentuk kekerasan dan konflik. Kekerasan menjadi seolah tradisi baru masyarakat yang melampiaskan amarahnya karena sulit untuk menghindarinya. Begitu juga dengan konflik individual hingga horizontal membuat suasana kehidupan terganggu dan menyedihkan. Pertahanan sosial masyarakat seperti gampang rapuh oleh hal-hal yang remeh, tawuran yang berujung mengorbankan jiwa, tindak pidana pembunuhan dengan latar dan motif yang beragam, padahal konon masyarakat kita terkenal dengan guyub, harmoni, dan memiliki daya tahan sosial cukup bagus.

Sesungguhnya konflik dan berbagai hal buruk dalam kehidupan masyarakat kita saat ini bukan karena buah reformasi. Boleh jadi era sekarang ini memang ada ruang lebih longgar sehingga masyarakat terlalu mudah melakukan tindakan apapun. Sedangkan era orde baru segalanya dihambat dan cepat ditangani oleh pemerintah, bukan karena moralnya baik, tetapi

karena rezim waktu itu memang otoriter dan militerisme sangat kuat. Sekarang semua hal bisa terjadi, serba terbuka untuk konflik.

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sinilah kemudian muncul istilah-istilah turunan dari demokrasi yaitu *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia) dan seterusnya.

Dalam konvensi barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “raja” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Dengan alasan inilah maka lembaga legislative di dunia barat menganggap sebagai pioneer dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.

Eksistensi wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu Negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh karena itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Dari sini kemudian muncul prinsip amanah dan tanggung jawab (*credible and accountable*) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah.

Secara normatif, Islam juga menekankan pentingnya ditegakkan nilai-nilai kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*nahi munkar*) bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai warga bangsa dan negara. Doktrin tersebut haruslah ditegakkan dalam kehidupan sosial keseharian di lingkungan masyarakat secara luas kapan dan dimana saja berada agar terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Idealnya, masyarakat aman dan sejahtera adalah masyarakat yang mampu mengemban dan menampilkan kehidupan secara baik dan berkelanjutan dalam melihat tenda kehidupan, sehingga membentuk watak dan karakter sosial yang genuin.

Bagaimanakah sesungguhnya nilai-nilai demokrasi dalam Islam yang dapat dijelaskan ? dan apakah nilai-nilai demokrasi dalam Islam mampu membangun karakter sebuah masyarakat ?. Tulisan ini ingin mengungkap nilai-nilai demokrasi dalam al-Qur'an dan menemukan apakah dengan nilai-nilai itu kemudian mampu membangun karakter masyarakatnya.

B. Istilah Demokrasi

Istilah demokrasi yang dapat dikemukakan disini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak ahli, yang dikutip Zainuddin¹ sebagai berikut :

Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan menurut Philippe Schmitter dan Terry Karl, bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih.

Dari tiga pendapat ahli diatas, jelaslah bahwa demokrasi itu mengandung nilai-nilai, yaitu adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, adanya pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin. Sementara Abdurrahman Wahid, mengungkapkan demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok, dan yang bersifat derivasi. Adapun nilai-nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan Negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat.

Demokrasi tidak boleh membuat derita masyarakat, tidak dibenarkan masalah-masalah yang terjadi ditengah masyarakat tiada terselesaikan, demokrasi harus memberikan jaminan hidup masyarakat bermartabat, demokrasi tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil demi mengamankan masyarakat perkotaan, namun diatas semua itu, demokrasi haruslah berpihak pada jalan hidup yang mensejahterakan masyarakat, melindungi hak-hak sosialnya secara sama, dan paling penting ialah demokrasi didorong mengambil langkah-langkah terdepan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam realitas konkret masyarakat.

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, oleh karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi pelbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan.

¹ Lihat Zainuddin, M., *Islam dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim)*. Jurnal Ulul Albab, Vol.4 No.2, 2002, STAIN Malang.

Masyarakat sendiri juga mempunyai pelbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, agar masyarakat itu dapat terus hidup².

Membicarakan persoalan demokrasi selalu ada yang menarik, karena demokrasi sebagai kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Bertolak dari paham tentang manusia adalah makhluk sosial yang sangat wajar, karena memang manusia merupakan pokok utama persoalan dalam berdemokrasi. Setidaknya alasannya adalah manusia itu mempunyai kesadaran yang membuat dirinya mampu mengambil jarak dari yang lain dan dari dirinya sendiri, manusia mempunyai atau setidaknya manusia merasakan adanya kebebasan, dan manusia mempunyai kemampuan untuk memilih, peka dan peduli akan nilai-nilai dan dapat membandingkan yang baik dan yang buruk.

A.M. Fatwa³ setidaknya merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dalam enam kriteria, : (1) partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Dalam konteks Indonesia, seperti di negara-negara modern, partisipasi itu diatur melalui mekanisme representasi/perwakilan melalui lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. (2) persamaan kedudukan di depan hukum. Setiap Negara demokrasi senantiasa merupakan Negara hukum. *Role of law* harus ditaati seluruh warga Negara tanpa pandang bulu. (3) distribusi pendapatan secara adil. Konsep persamaan dalam demokrasi harus dimaknai secara utuh. Artinya persamaan tidak bisa hanya berlaku pada satu aspek saja seraya mengabaikan aspek yang lain. (4) kesempatan pendidikan yang sama. Keberhasilan di bidang pendidikan merupakan kunci pembuka bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang. (5) adanya kebebasan berpendapat, berserikat/berkumpul, dan beragama. Kebebasan-kebebasan ini harus dimiliki setiap individu dalam Negara demokrasi. (6) adanya kerjasama setiap prinsip demokrasi, artinya demokrasi tidak bisa dijalankan dengan paksa, sehingga mengganggu kepentingan orang lain, karena itu diperlukan kerjasama yang baik.

D. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam

Masa depan peradaban bangsa terletak pada sejauhmana prinsip-prinsip demokrasi bisa diwujudkan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Negara-negara yang tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi mengalami kehancuran.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain : QS. Ali Imran 159 dan al-Syura 38 yang berbicara musyawarah,

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hal.26.

³ A.M. Fatwa, *Paradigma Pembangunan Demokrasi Politik dalam Mewujudkan Peradaban Bangsa*. (Jakarta : Jurnal Profetik, 2002), hal. 73.

bahwa dengan bermusyawarah itu kasih sayang Tuhan akan dilimpahkan kepada mereka semuanya, hendaklah kalau bermusyawarah dengan perilaku lemah lembut diantara sesama, berilah maaf apabila ada yang berbeda pendapat diantara kamu dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan membulatkan tekad serta bertawakkal kepada Allah atas semua urusan yang dihadapi, karena semua itu adalah bentuk kepatuhan.

Tentang keadilan dalam surat al-Maidah ayat 8 dan surat al-Syura 15 disebutkan perihal keadilan, manusia beriman diperintahkan untuk menjadi penegak kebenaran dan keadilan, menjadi saksi dengan adil, tidak membenci atas sesama manusia, dan keadilan itu lebih dekat kepada takwa (Tuhan). Untuk menjaga dari perilaku tidak adil, Maka juga diperintahkan menyeru kejalan agama dengan baik, janganlah mengikuti hawa nafsu, diperintahkannya supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan yang akan membalas semua kebajikannya.

Dalam hal persamaan, surat al-Hujurat⁴ ayat 13 menyatakan “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. Intinya adalah manusia laki-laki dan perempuan itu sama dimata Tuhan, manusia itu harus sama perlakuannya didepan hukum, baik antar suku dan antar bangsa.

Tentang amanah dalam surat al-Nisa’ 58 dijelaskan bahwa “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”⁵. Bahwa menunaikan amanah menjadi tugas bersama kita semua dalam rangka tegaknya hkum dan keadilan.

Surat Ali Imran⁶ 104 membicarakan tentang kebebasan mengkritik, “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. Manusia dengan potensinya selalu menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keburukan,

⁴ Lihat QS. al-Hujurat 43 : 13.

⁵ Lihat QS. an-Nisa’ 4 : 58.

⁶ Lihat QS. Ali Imran 3 : 104.

memberikan kritik tentunya diharapkan membawa kepada kebaikan, bukan kritik yang malah menjauhkan dari kebaikan bersama.

Dalam hal kebebasan berpendapat, al-Qur'an⁷ memberikan petunjuk bahwa perbedaan pendapat itu hal yang biasa dan wajar, dan harus disikapi dengan kebaikan yang akan mengantarkan kepada keutamaan hidup dan kehidupan.

Menurut Aswab Mahasin⁸, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama itu berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi.

Bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi : *as-syura*, *al-musawah*, *al-'adalah*, *al-amanah*, *al-mas'uliyah*, dan *al-hurriyyah*. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, syura yang merupakan suatu prinsip tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan secara eksplisit ditulis dalam al-Qur'an, misalnya : “dan urusan mereka diselesaikan dengan cara musyawarah diantara mereka” (QS. as-Syura 38). Dalam surat Ali Imran 159 juga dinyatakan : “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.

Kedua, al-'Adalah adalah keadilan. Ajaran tentang keharusan melakukan hukum dengan adil tanpa pandang bulu, banyak ditegaskan dalam al-Qur'an, bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu karena jika “orang kecil” melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melakukan pelanggaran “orang besar” hukum selalu berlalu. (QS. as-Syura 15), (QS. al-Maidah 8) dan (an-Nisa' 58).

Ketiga, al-Musawah yaitu kesejajaran, egaliter. Dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 disebutkan : “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Kesejajaran adalah tidak merasa paling unggul, tidak congkak, tidak pernah merendahkan sesame orang lain. Demokrasi yang meletakkan semangat egaliter akan menghasilkan semangat juang dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

⁷ Lihat QS. an-Nisa' 4 : 59, 83 dan as-Syura 38.

⁸ Lihat Aswab Mahasin dalam Imam Azis, et.al. (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta : Gramedia 1999, hal.31.

Keempat, al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Kepercayaan atau amanah memang harus dijaga dengan baik. (QS. an-Nisa' 58). Dalam pembangunan demokrasi, masyarakat menjadi tulang punggung kesuksesan perjalanan kehidupan, manakala semaksimal mungkin menjaga kepercayaan, pemimpinnya memiliki kepercayaan kepada masyarakatnya, dan masyarakat yang selalu menjaga stabilitas gerak pemimpinnya.

Kelima, al-Mas'uliyah yaitu tanggungjawab. Sabda Nabi SAW : “setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya”. Tanggung jawab individu dan kelompok tetap diperlukan dalam rangka menjaga pertanggungjawabannya. Masyarakat bertanggung jawab atas perjalanan pemerintahannya dengan memberikan masukan/input perbaikan kelembagaan Negara. Pemimpinnya bertanggung jawab atas keberlangsungan hajat hidup orang banyak.

Keenam, al-Hurriyah yaitu kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga negara, masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Masing-masing individu memberikan kebebasan dalam kerangka membangun bangsa dan negaranya, sementara pemerintah menjaga stabilitas, rasa aman dan terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat menuju sebuah Negara yang sejahtera lahir dan batin di bawah panji-panji kemakmuran.

E. Membangun Karakter Masyarakat

Secara etimologis, karakter berasal dari bahasa Yunani *karasso*, yang berarti cetak biru, format dasar, sidik. Karakter adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh intervensi manusiawi, seperti ganasnya laut dengan gelombang pasang dan angin yang menyertainya, karena itu berhadapan dengan apa yang memiliki karakter, manusia tidak dapat ikut campur tangan atasnya⁹.

Karakter sebagai suatu kondisi yang diterima tanpa kebebasan dan karakter yang diterima sebagai kemampuan seseorang untuk secara bebas mengatasi keterbatasan kondisinya ini membuat kita tidak serta merta jatuh dalam fatalism akibat determinasi alam, atau pun terlalu tinggi optimisme seolah kodrat alamiah kita tidak menentukan pelaksanaan kebebasan yang kita miliki¹⁰.

Ketenangan, ketentraman dan kedamaian hidup tentunya bukan merupakan sesuatu yang dengan begitu saja bisa kita nikmati tanpa usaha. Ketenangan, ketentraman dan

⁹ Lihat Doni Koesoema, *Tiga Matra Pendidikan Karakter*. (Yogyakarta : Majalah Basis, 2007), hal 19.

¹⁰ Ibid, 20.

kedamaian hidup adalah merupakan hasil dari sebuah proses yang secara sadar dan sengaja harus diusahakan. Diantara usaha yang perlu dilakukan agar Ketenangan, ketentraman dan kedamaian menyelimuti hidup dan kehidupan kita, antara lain, hendaklah masing-masing kita, disamping memikirkan kepentingan diri sendiri, jangan lupa juga memikirkan kepentingan orang lain.

Sebagai makhluk yang tidak mungkin dan tidak mampu hidup seorang diri, hendaklah kita menyeimbangkan antara kepentingan diri pribadi dengan kepentingan orang lain dan masyarakat. Janganlah kita, karena dorongan tuntutan hawa nafsu misalnya, lantas hidup bermewah-mewah, mempertontonkan kekayaan dan kelebihan yang kita miliki, ditengah-tengah kebanyakan warga masyarakat yang akibat krisis ekonomi, hidupnya dalam kondisi serba kekurangan dan kemiskinan.

Untuk bisa hidup dalam sebuah masyarakat yang sangat terbuka, setidaknya ada empat sikap yang harus dimiliki masyarakat itu¹¹, *pertama* : sikap inklusif. Sikap yang memberikan keluasan bertindak bagi setiap individu dan sosial untuk tidak menjauhkan diri dan larut dalam keramaian orang dan masyarakat. *Kedua*, sikap humanisme (*egalitarianisme*). Sikap humanisme ini sebagai cara pandang yang memperlakukan manusia karena kemanusiaannya, bukan karena sebab yang lain, misalnya ras, kasta, warna kulit, kedudukan, kekayaan atau bahkan agama. *Ketiga*, sikap toleransi. Sikap masyarakat yang toleran tidak pernah memaksakan kehendak, tidak merasa paling benar. *Keempat*, sikap demokratis (kebebasan berpikir). Salah satu sifat yang tidak boleh ditinggalkan dalam demokrasi adalah kebebasan individu untuk mengemukakan pendapatnya, dengan kata lain harus ada kebebasan berpikir.

Disamping itu, karakter moralitas masyarakat juga harus direkonstruksi agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Karakter moralitas mengakui keadaan alamiah manusia dan menerima realitas dunia. Ia tidak mengingkari apapun dari bagian-bagian keadaan alamiah itu. Penyiksaan terhadap diri sendiri, asketisme, penghinaan terhadap orang lain, semuanya itu tidak dikenal dalam masyarakat yang terbuka. Moralitas masyarakat yang berkarakter pada prinsipnya didasarkan atas penegasan terhadap realitas kemanusiaan dan pemenuhan diri menghadapi semua bentuk frustasi dan kesengsaraan. Dengan demikian, moralitas masyarakat yang berkarakter dalam keadaan alamiah itu adalah hal yang sama.

Masyarakat berkarakter moralis, akan selalu memiliki kekuatan untuk mengidentifikasi dirinya sendiri melalui watak budayanya yang alamiah. Moralitas

¹¹ Lihat Mulyadhi Kertanegara, *Empat Sikap Tuntutan Masyarakat Multikultural*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2004), hal 26.

masyarakat berkarakter akan memperluas dirinya dari level individu kepada level sosial. Dengan kata lain, masyarakat haruslah menjadi tujuan akhir dari komitmen sosialnya. Upaya-upaya membangun masyarakat berkarakter, diperlukan stabilitas moral yang memadai agar masyarakat tidak bertindak anarkhis, menodai demokrasi. Masyarakat dengan karakter demokratis, setidaknya menerapkan paradigma pembangunannya yang relevan di suatu negaranya, melakukan penyesuaian-penyesuaian nilai-nilai baru terhadap paradigma yang sudah ada, tidak suka memaksakan kehendak, apalagi perilaku yang merampas kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip dalam demokrasi, otoritarian yang menyertai pelaksanaan demokrasi tidak diberikan ruang untuk berkembang.

Untuk pembangunan kedepan, kita semua masyarakat Indonesia sesungguhnya telah mempertimbangkan secara matang paradigma demokrasi-religius, yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam membangun bangsa.

F. Kesimpulan

Demokrasi tidak boleh membuat derita masyarakat, demokrasi haruslah berpihak pada jalan hidup yang mensejahterakan masyarakat, melindungi hak-hak sosialnya secara sama, dan paling penting ialah demokrasi didorong mengambil langkah-langkah terdepan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam realitas konkret masyarakat.

Nilai-nilai demokrasi haruslah melahirkan : partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan, adanya persamaan kedudukan di depan hukum, adanya distribusi pendapatan secara adil, adanya kesempatan pendidikan yang sama, adanya kebebasan berpendapat, berserikat/berkumpul, dan beragama, serta adanya kerjasama setiap prinsip demokrasi.

G. Daftar Pustaka

- A.M. Fatwa, *Paradigma Pembangunan Demokrasi Politik dalam Mewujudkan Peradaban Bangsa*. (Jakarta : Jurnal Profetik, 2002), hal. 73.
- Aswab Mahasin dalam Imam Azis, et.al. (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta : Gramedia 1999, hal.31.
- Doni Koesoema, *Tiga Matra Pendidikan Karakter*. (Yogyakarta : Majalah Basis, 2007), hal 19.
- Mulyadhi Kertanegara, *Empat Sikap Tuntutan Masyarakat Multikultural*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2004), hal 26.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*.(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hal.26.

Zainuddin, M., *Islam dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim)*.
Jurnal Ulul Albab, Vol.4 No.2, 2002, STAIN Malang.